

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA TERHADAP MALADMINISTRASI PENDATAAN TANAH GIRIK DI BUKU *LETTER C* DESA LEUWINANGGUNG

Andi Abdul Kahar

Abstrak

Pemerintahan Desa berperan memberi pelayanan kepada masyarakat yang hendak mendaftarkan tanah untuk pertama kali dengan menyediakan bukti permulaan berupa salinan letter C. Penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah belum terdaftar atas mal administrasi Pemerintah Desa, juga bagaimana tanggung jawab Pemerintah Desa dalam hal terjadi mal administrasi letter C sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik hak atas tanah belum terdaftar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, kemudian dianalisis secara kualitatif. Secara teoritis tidak ada perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah belum terdaftar karena pada prinsipnya pendaftaran tanah yang diatur dalam perundang-undangan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan menciptakan kepastian hukum, namun pada praktiknya pemilik hak atas tanah yang merasa haknya terlanggar dapat mengajukan keberatan ataupun gugatan, dan Pemerintah Desa yang terbukti melakukan mal administrasi dapat dikenai sanksi jabatan yang ditetapkan oleh Bupati.

Kata kunci: *Mal administrasi; Pemerintahan Desa; Letter C.*

**VILLAGE HEAD ACCOUNTABILITY FOR MALADMINISTRATION OF
LAND DATA GIRIK IN LEUWINANGGUNG VILLAGE
BOOK LETTER C**

Andi Abdul Kahar

Abstract

The Village Government has the role of providing services to the community who wish to register their land for the first time by providing preliminary evidence in the form of a copy of letter C. This study examines how legal protection for owners of land rights has not been registered over the Village Government administration mall, as well as the responsibilities of the Village Government in terms of letter C maladministration occurs, causing losses to owners of unregistered land rights. This research was conducted using a normative juridical approach. The research specifications are analytical descriptive in nature, then analyzed qualitatively. Theoretically there is no legal protection for owners of unregistered land rights because in principle land registration regulated in legislation aims to provide legal protection and create legal certainty, but in practice owners of land rights who feel their rights have been violated can file objections or lawsuits. , and the Village Government who are proven to have committed administrative malfeasance may be subject to a position sanction determined by the Regent.

Keywords: Administrative mall; Village Administration; letter C